**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

 **PEMBINAAN PELAYANAN KB TAHUN 2019**

**BAB. I**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pertambahan jumlah penduduk menjadi ancaman terhadap kemungkinan ledakan penduduk. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk dengan program KKBPK melalui empat pilarnya yaitu :

* Pendewasaan usia Perkawinan
* Pengaturan Kelahiran
* Peningkatan ketahanan keluarga
* Peningkatan kesejahteraan keluarga

Usaha Pengaturan kelahiran difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan, mendorong PUS memakai metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP). Penyediaan layanan kontrasepsi dan integrasi konsep layanan yang berbasis komunikasi, telah berhasil menurunkan angka kelahiran, berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kelahiran /Total Fertility Rate (TFR) secara nasional cendrung menurun dari 2,6 (SDKI 2012 menjadi sekitar 2,4 (SDKI 2017) , walaupun sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu 2,33 (RPJMN 2015-2019), namun hal tersebut menujukan pencapaian yang lebih baik dari tahun ke tahun dan pemakaian alat kontrasepsi masih didominasi oleh metode kontrasepsi jangka pendek. Sementara untuk Sumatera Barat angka TFR SDKI tahun 2012 2,8 dan 2,5 tahun 2017. Pengguna kontrasepsi jangka pendek di Sumatera Barat meningkat dari hasil SDKI 2012 sebanyak 61.996 pengguna, menjadi 63.646 pengguna (SDKI 2017).

Sebuhungan hal di atas perlu meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pencapaian program KKBPK di Sumatera Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu layanan KB serta meningkatkan kemampuan pengelola program KB melalui pertemuan dan koordinasi dengan OPD terkait Kabupaten Kota.

**Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
5. Perka BKKBN nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Jaminan dan Pelayanan KB;
6. Perka BKKBN nomor 149/HK-010/B5/2009 tentang Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;
7. Perka BKKBN nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Kelembagaan dan Jejaring Program KB;
8. Perka BKKBN nomor 55/ HK-10/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum KB;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

**Tujuan**

* Memperkuat komitmen pejabat pengelola KB Kabupaten Kota terhadap pelaksanaan program KKBPK serta meningkatkan keterpaduan dan sinergitas program untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB
* Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitas pelayanan KB
* Menjaring informasi perkembangan pembinaan pelayanan KB di Kabupaten Kota

**D. Sasaran**

Pejabat pengelola KB dan pejabat pengelola data KB kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.

**BAB II**

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pertemuan dalam rangka menjaring informasi perkembangan dan memperkuat komitmen pembinaan pelayanan KB di Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada triwulan I, II dan III pada tahun 2019.

A.1 Pelaksanaan Pertemuan Pertama kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 pada tanggal 13 Juni 2019 bertempat di Aula Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini terlaksanakan kerjasama dengan Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman, terkait program inovasi yang telah dilakukan Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman tentang peningkatan kualitas layanan KB. Program inovasi ini penting untuk diketahui oleh Dinas PPKB Kabupaten Kota lainnya, dan layak untuk dicontoh.

1. Pertemuan ini dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri dari Kadis yang membidangi PPKB dan Dukcapil Kabupaten Kota se Sumatera Barat. Mengikutsertakan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota karena Program inovasi yang dikembangkan oleh Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman melibatkan dinas Dukcapil dengan mengakses NIK sebagai pembuka aplikasi yang dibuat.
2. Kegiatan dibuka langsung oleh Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat ( H. Novrial , SE, MA, AKt) dalam sambutannya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi terhadap Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman telah membuat beberapa program inovasi untuk peningkatan program KKBPK di Padang Pariaman, salah satunya adalah Aplikasi KOPI DARAT yang dalam hal ini suatu apikasi upaya efisiensi peningkatan kualitas dan cakupan layanan KB. Berkaitan dengan aplikasi tersebut maka Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat berinisiasi untuk melaksanakan pertemuan ini dalam rangka mensosialisasikan program ini yang memang patut untuk dikembangkan. Selanjutnya Bapak Novrial mengharapkan saran dan kritikan dari audience dalam upaya pengembangan program aplikasi cakupan pelayanan KB ini.
3. Bapak Aspinuddin (Kepala Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman) selaku Narasumber pada kegiatan ini memaparkan bahwa Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 ini telah membuat 4 Program inovasi yaitu :
* Aplikasi KOPI DARAT (Komprehensif Online Penyajian Inovasi Data Akurat)
* CAKAU ( Cari Akseptor, Alat Kontrasepsi tersedia gratis, Tingkatan Kualitas dan turunkan Unmet need)
* SERGAB KAKAB ( Serentak menggarap Kampung KB melalui keterlibtan Masyarakat dan lintas sektor terkait melaksanakan pelayanan KB langsung seluruh wilayah Kampung KB)
* BERE – BERE ( Bengkel Remaja Bereputasi) Pembinaan PIK Remaja diseluruh sekolah melalui kesiapan Forum Genre untuk diterjunkan kesekolah-sekolah untuk kompetensi dan pencegahan HIV AIDS dan Seks bebas dan kerjasama dengan UKS, PKPR.

Program inovasi ini lahir karena mekanisme pelaporan data KB yang cukup rumit, banyaknya blanko yang akan diisi, berkurangnya petugas PLKB, sehingga seringnya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan dan seringnya pelaporan yang tidak lengkap. Dari Program inovasi ini terutama KOPI DARAT bisa dilakukan efisiensi pelaporan dan peningkatan kualitas layanan KB. Bahkan dalam Aplikasi KOPI DARAT masyarakat bisa langsung berinteraksi melalui aplikasi WEB diandroid. Aplikasi KOPI DARAT ini telah melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Padang Pariaman makanya bisa mengakses Aplikasi KOPI DARAT melalui NIK. Dengan memasukan nomor NIK masyarakat bisa mengakses dan bisa bertanya langsung apa saja terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.

1. Dari Paparan Narasumber, Audience mengharapkan adanya Replikasi dari Aplikasi ini yang nanti bisa dipakai dan dikembangkan di daerah masing-masing. Audience juga mengkhawatirkan apakah sistim pendataan ini tidak terjadi tumpang tindih dengan sistim pendataan sebelumnya, karena akan menambah pekerjaan petugas lapangan.

Bapak Aspinuddin menyatakan bahwa replikasi bisa saja dilakukan tetapi melalui MOU dan sekarang Aplikasi tersebut masih dalam proses penyempurnaan, dan bahkan Pak aspinuddin mempersilahkan OPD PPKB Kabupaten Kota lain untuk datang dan melihat secara langsung Aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat mempermudah petugas dalam melakukan prosesi pendataan, dan memudahkan petugas lapangan dalam menjangkau akseptor KB.

1. Pertemuan dalam rangka sosialisasi peningkatan Cakupan Layanan KB melalui aplikasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota karena aplikasi ini memanfaatkan NIK sebagai data by name by address dalam cakupan layanan KB.
2. Beberapa keunggulan dari Aplikasi ini adalah sebagai berikut :
3. Tersedianya Data setiap KK, mulai dari Data Umum sampai kedata program KKBPK seperti :
4. PUS, WUS
5. Jenis Kepesertaan ber KB (IUD, Implan, Suntik, Pil, Kondom, MOW dan MOP)
6. Jenis Peserta (baru, ulangan, aktif)
7. Tempat Layanan (pemerintah, swasta)
8. Memiliki kartu JKN (PBI/Non PBI, tidak ada)
9. Tahapan KS (Pra KS, KS 1, KS )
10. Kelompok Catur Bina ( BKB, BKR, BKB, UPPKS)
11. Kampung KB
12. Unmeet need (IAT, TIAL, Hamil IAS
13. Setiap PUS/KK yang ingin ber KB/Bila Ada Efek samping/komplikasi bisa langsung mendaftar secara online
14. Dari Data yang sudah di update akan uncul masalah yang perlu penanganan segera seperti : jumlah sasaran yang belum ber KB, sasaran Catur Bina, Unmeet need (IAT, TIAL, Hamil IAS (perkorong)

A.2 Pelaksanaan Pertemuan Kedua kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 pada tanggal 9 Juli 2019

Hasil Pertemuan:

1. Kegiatan yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri dari Kadis yang membidangi PPKB dan Dukcapil Kabupaten Kota se Sumatera Barat dibuka langsung oleh Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat ( H. Novrial , SE, MA, AKt) dalam sambutannya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi Kabupaten Padang Pariaman telah membuat beberapa program inovasi khususnya Dinas Dukcapil dan Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman yang telah berkolaborasi dalam program inovasinya yaitu program inovasi peningkatan pelayanan KB melalui Aplikasi pemanfaatan NIK melalui web. Selanjutnya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat mengharapkan kepada peserta untuk dapat memberikan masukan dan kritikan atas program ini karena ini program inovasi ini baru dilaunching pada tanggal 3 Mei 2019, dan masih dibutuhkan pengembangan dan perbaikan.
2. Bapak Fadli (Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman) selaku Narasumber pada pertemuan tersebut memaparkan pasca gempa tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman bangkit dengan ide membentuk Tim Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui keputusan Bupati. Tim membuat perencanaan untuk membuat inovasi program kegiatan pada setiap OPD Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Dukcapil sendiri sudah menghasilkan 28 program inovasi dan sekarang sedang berkolaborasi dan Dinas PPKB dalam hal meningkatkan pelayanan KB melalui aplikasi pemanfaatan NIK melalui WEB. Program ini disebut KOPI DARAT (Komprehensif Online Penyajian Inovasi Data Akurat). Masyarakat bisa mengakses aplikasi ini melalui HP Android dan berinteraksi dengan Dinas PPKB dalam pelayanan KB. Ada 3 fitur yang bisa diakses dalam aplikasi ini yaitu :
3. Pengajuan Pemasangan KB
4. Pengaduan dan Konsultasi KB
5. Konsultasi Remaja

Dengan hanya memasukan / mengetik nomor NIK masyarakat sudah bisa mengakses KOPI DARAT ini. Karena Admin telah memasukan data NIK penduduk Kabupaten Padang Pariaman ke Aplikasi ini. Setiap pertanyaan masyarakat akan di jawab oleh admin dan Tim yang telah dibentuk oleh Dinas PPKB dan Dinas Dukcapil. Masyarakat bisa bebas bertanya terkait masalah Keluarga Berencana dan Remaja, tanpa was-was pertanyaan mereka akan diketahui oleh masyarakat lain, karena identitas penanya hanya diketahui oleh admin. Disamping itu masyarakat juga dapat meminta pelayanan KB yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Cakau. Dengan tersedianya aplikasi KOPI DARAT ini , akan tersedia Data kesertaan ber KB perwilayah di Kabupaten Padang Pariaman, dan juga jenis Alkon yang dipakai oleh setiap penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

1. Dalam diskusi yang berkembang, Audience menanyakan siapa yang bertugas dan menginput data kesertaan ber KB, apakah ditunjuk lagi petugas baru , dan terjadi tumpang tindih data dengan aplikasi yang telah ada yang telah dibuat oleh BKKBN (Data SIGA)

Bapak Fadli menjelaskan bahwa petugas Input Data berasal dari :

* Petugas PPKB Kecamatan,
* Petugas PPKB Nagari
* Petugas Posyandu
* Dasa Wisma
* Bidan Desa
* Kolaborasi dengan Sistem Gizi Terpadu (e-PPGBM) – Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

Dan sebagian dari petugas tersebut sudah diberi pelatihan penginputan data. Memang butuh pendanaan untuk jalannya aplikasi ini seperti pembiayaan :

* Pelatihan pengembangan SDM TI, SDM terkait Keluarga Berencana
* Pengembangan aplikasi
* Sarana pendataan

Tidak akan terjadi tumpang tindih data, namun diharapkan aplikasi KOPI DARAT ini melengkapi sistim informasi yang ada.

Selanjutnya pak Fadli menjelaskan bahwa Aplikasi ini dapat direplikasi oleh Kabupaten Kota lain melalui MOU dengan Kabupaten Padang Pariaman.

A.3. Pelaksanaan Pertemuan Ketiga kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019, pada tanggal 11 Oktober 2019

Pertemuan kali ini mengangkat tema “***Teknis Penghitungan IKU PPKB”***

Hasil Pertemuan:

* 1. Kegiatan yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri dari Pejabat dan staf pengolah data PPKB Kabupaten Kota se Sumatera Barat dibuka langsung oleh Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat (H. Novrial , SE, MA, AKt) dalam sambutannya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan dalam rangka pencapaian kinerja urusan PPKB dilihat dari capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) PPKB yaitu LPP, TFR, CPR dan Unmet Need. Teknis penghitungan capaian kinerja IKU ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menghitung IKU PPKB. Selanjutnya Kadis menyarankan untuk berinteraksi dengan narasumber dalam proses penghitungan IKU PPKB.
	2. Narasumber pada acara ini Ibu Desi Febriyanti dari BPS Provinsi Sumatera Barat memaparkan Teknis Penghitungan IKU PPKB.

BPS sebagai lembaga non kementerian kedudukannya independen dan berperan sebagai check dan control semua angka statistik lembaga pemerintah.

* LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk )

BPS menggunakan metode geometrik dalam penghitungan LPP dengan asumsi pertambahan penduduk akan bertambah secara geometrik.

* TFR (Total Fertility Rate)

TFR (angka total fertilitas) adalah jumlah rata –rata anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai masa akhir reproduksinya, data diambil dari hasil sensus dan survey kependudukan (melalui kuesioner tentang kelahiran anak).

* CPR (Contraceptive Prevalence Ratio)

CPR merupakan proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin/PUS sedang menggunakan alat kontrasepsi baik secara KB modern maupun tradisional (CPR = PA (pus yang aktif ber KB) / PUS x 100)

* Unmet Need (Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi)

Rumus :

**

Dimana PUS yang termasuk kedalam kelompok dengan kebutuhan pelayanan KB tidak terpenuhi/*unmet need* KB adalah:

* Wanita yang tidak sedang menggunakan KB, sedang hamil tetapi kehamilannya tidak diinginkan untuk saat ini, dan ingin punya anak 2 tahun lagi. (penjarangan)
* Wanita yang tidak sedang menggunakan KB, sedang hamil tetapi kehamilannya tidak diinginkan untuk saat ini, dan tidak ingin punya anak lagi. (pembatasan)
* Wanita yang tidak sedang menggunakan KB, tidak sedang hamil, dan ingin punya anak 2 tahun lagi. (penjarangan)

 Ingin Anak Tunda (IAT)

* Wanita yang tidak sedang menggunakan KB, tidak sedang hamil, dan tidak ingin punya anak lagi. (pembatasan)

 Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)

Dari hasil diskusi berkembang :

* Angka LPP dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada tahun dasar sebagai patokan dan tahun (t) sebagai periode waktu antara tahun dasar dan tahun (t)
* TFR dihitung BPS Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SDKI.

Sementara data yang selama ini dihitung oleh kabupaten kota adalah data rata-rata anak lahir hidup

* Untuk Angka CPR dan Unmet Need sesuai rumus yang telah dipaparkan

Namun perlu diklarifikasikan kembali definisi unmet need sesuai dengan kegunaan indikator.

* OPD PPKB Kabupaten Kota mengirimkan secara periodik data capaian kinerja ini setiap 3 bulan (triwulan) ke DPPKBKPS Provinsi Cq. Bidang KBKK
* Memperbaharui SK Gubernur tentang Pembentukan POKJA Data KKBPK yang beranggotakan Pejabat Pengolah Data PPKB Provinsi dan Kabupaten Kota, (OPD PPKB Kabupaten Kota mengirimkan segera 1 (satu) nama usulan Anggota POKJA dari OPD masing-masing)
1. **Kendala dan Hambatan**
	* + 1. Materi pertemuan belum sesuai dengan yang direncanakan karena :
2. Belum adanya tim yang valid dalam menjalankan Aplikasi KOPI DARAT dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat melalui online
3. Dalam menjalankan situs WEB ini sering mengalami kendala bagi daerah yang jauh dari jangkauan jaringan internet
4. Belum sesuai dengan kewenangan Provinsi, pelayanan KB termasuk dalam kebutuhan teknis
	* + 1. Dalam hasil pertemuan, Provinsi belum bisa mendorong Kabupaten Kota untuk melakukan pengembangan Aplikasi KOPI DARAT karena adanya peningkatan SDM, Sarana dan Prasarana yang bernuansa IT yang semua membutuhkan anggaran.
			2. Saat pertemuan yang ke 2 (dua) untuk menggunakan aplikasi KOPI DARAT tidak bisa ditampilkan maksimal karena masalah jaringan internet yang lambat sehingga tidak bisa memvisualkan cara mengakses Pelayanan KB dan berinteraksi melalui WEB KOPI DARAT
			3. Belum terdapat dukungan anggaran APBD Provinsi untuk mereplikasi program KOPI DARAT dan mendorong Kabupaten Kota agar melakukan MOU dengan Dinas PPKB dan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman.

**BAB III**

**HASIL YANG DICAPAI**

Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu :

* + - 1. Tanggal 13 Juni 2019

Bertempat di Aula Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat Tema ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB Melalui Aplikasi***

* + - 1. Tanggal 9 Juli 2019

Bertempat di Aula DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat tema ***Pemanfaatan NIK dalam Meningkatkan Kesertaan KB***

* + - 1. Tanggal 11 Oktober 2019

Bertempat di Aula DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat tema “***Teknis Penghitungan IKU PPKB***

1. **Hasil Yang Diharapkan**

Dapat dibekalinya 19 (Sembilan belas) OPD PPKB dan Dukcapil Kabupaten Kota se Sumatera Barat dalam pengelolaan program KB dan data KB melalui :

* 1. Program Inovasi yang telah dilakukan Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman bisa dilakukan efisiensi mekanisme pelaporan KB dan peningkatan pelayanan KB.
	2. Pada Aplikasi KOPI DARAT masyarakat bisa langsung berinteraksi melalui aplikasi WEB diandroid. Aplikasi KOPI DARAT ini telah melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Padang Pariaman makanya bisa mengakses Aplikasi KOPI DARAT melalui NIK. Dengan memasukan nomor NIK masyarakat bisa mengakses dan bisa bertanya langsung apa saja terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.
	3. Dalam rangka pencapaian kinerja urusan PPKB dilihat dari capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) PPKB yaitu LPP, TFR, CPR dan Unmet Need.
	4. Teknis penghitungan capaian kinerja IKU :
* Angka LPP dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada tahun dasar sebagai patokan dan tahun (t) sebagai periode waktu antara tahun dasar dan tahun (t)
* TFR dihitung BPS Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SDKI.
	+ - Sementara data yang selama ini dihitung oleh kabupaten kota adalah data rata-rata anak lahir hidup
* CPR (CPR = PA (pus yang aktif ber KB) / PUS x 100)
* Unmet Need (Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi)

Rumus :

**

Terdapatnya persamaan persepsi pejabat pengelola KB dalam peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pelayanan KB dan data KB

Meyamakan persepsi dalam pengelolaan data KB dalam rankga meningkatkan kepersertaan ber KB serta meningkatkan mutu dan kualitas layanan KB

1. **Capaian Realisasi Anggaran**

Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB Tahun 2019 yang pembiayaannya dibebankan pada DPA- OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat No. DPA-OPD : 1.02.08.01.112.005 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 26.270.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan realisasi fisik 100 persen dan realiasasi keuangan sebesar 98,11%, dengan rincian seperti yang diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1. | ATK |  3.690.000 | 3.690.000 | - | 100 % | 100 % |
| 2. | Belanja Jasa Narasumber |  3.000.000 | 3.000.000 |  | 100 % | 100% |
| 3. | Belanja Penggandaan |  1.772.000 | 1.772.000 | - | 100 % | 100 % |
| 4. | Belanja Makan Minum Rapat |  520.000 |  520.000 | - | 100 % | 100 % |
| 5. | Belanja Makan Minum Kegiatan |  8.760.000 |  8.760.000 | - | 100 % | 100 % |
| 6. | Perjalanan Dinas |  |  | - |  |  |
|  | Luar Daerah |  8.528.000 |  8.030.500 | 497.500 | 100 % | 94,17 % |
|  | Jumlah | 26.270.000 | 25.772.500 |  497.500 | 100% | 98,11% |

Terdapat Sisa lebih pada anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat dipergunakan, karena sisa lebih ini terdapat pada anggaran penginapan yang tersedia untuk Eselon III dan penggunaan riilnya untuk eselon IV.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulan**

Melalui kegiatan Pembinaan Pelayanan KB tahun 2019 telah dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan, dua kali pertemuan menghadirkan pejabat pengelola KB dan pejabat pengelola data KB pada OPD KB serta Pejabat pengelola KTP pada OPD Dukcapil kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat dan pertemuan ke tiga menghadirkan pejabat pengelola Data KB Kabupaten Kota, dan dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

* + - 1. Materi yang di paparkan belum sesuai dengan yang direncanakan tidak sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.
			2. Aplikasi KOPI DARAT merupakan aplikasi yang dilakukan oleh Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman kerjasama dengan Dinas Dukcapil Padang Pariaman dan masyarakat bisa mengakses Aplikasi KOPI DARAT melalui NIK. Dengan memasukan nomor NIK masyarakat bisa mengakses dan bisa bertanya langsung apa saja terkait kesehatan reproduksi dan pelayanan KB. Aplikasi ini bisa dicontoh dan di replikasi oleh OPD PPKB Kabupaten Kota lain melalui MOU dengan OPD PPKB Kabupaten Padang Pariaman.
			3. Kabupaten Kota diminta mengirimkan Data IKU pertriwulan dengan menggunakan teknik penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan PPKB Provinsi (Laju Pertumbuhan Penduduk, TFR, CPR dan Unmet Need) dengan panduan BPS yang merupakan lembaga non kementerian berperan sebagai chek dan control semua angka statistik lembaga pemerintah
1. **Saran**
	* + 1. Melalui sosialisasi Aplikasi KOPI DARAT, diharapkan OPD PPKB dan OPD Dukcapil Kabupaten Kota se Sumatera Barat bisa meniru dan mereplikasi aplikasi ini untuk memperoleh data yang lebih akurat. Untuk Pengembangan program KOPI DARAT di Kabupaten Kota lainnya perlu kerjasama antara Dinas PPKB dengan Dinas Dukcapil wilayah masing-masing.
			2. OPD PPKB Kabupaten Padang Pariaman yang telah melakukan program Inovasi KOPI DARAT ini agar segera melengkapi program ini sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan data yang diperlukan dalam mewujudkan peningkatan layanan KB
			3. Provinsi Sumatera Barat dapat mengembangkan dan mereplikasi aplikasi KOPI DARAT untuk menyediakan data IKU Bidang KBKK lingkup Provinsi yang lebih akurat
			4. Perlu lebih ditingkatkan peningkatan kapasitas ASN dalam pengumpulan data kinerja Bidang KBKK agar IKU yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
			5. Perlu memperbaharui keanggotaan Kelompok Kerja Data KB agar pengolahan dan pengiriman data KB secara periodik ke DPPKBPKS Provinsi.

Pada kurun waktu dua tahun terakhir 2015-2017 dapat dilihat pencapaian CPR Provinsi Sumatera Barat cenderung naik sebanyak 134.866 (11,28%) yaitu tahun 2015 CPR 57,19% cenderung naik per Oktober tahun 2017 68,47%. Dari kondisi kepesertaan ber-KB dan kondisi unmeet need Provinsi Sumatera Barat masih tinggi

Kepesertaan KB (contracepci prevalence rate/cpr) adalah perbandingan jumlah seluruh peserta aktif (PA) KB berbagai metoda dibagi pasangan usia subur (PUS) pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur 15-49 tahun.

Menurut laporan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 per bulan Oktober 2017 Peserta KB baru IUD sebanyak 64.352 (130,01%), Pil sebanyak 34.231 (37,81%), Peserta KB aktif (PA) sebanyak 551.107, PPM PA sebanyak 503.646, Total PUS sebanyak 804.891 sebanyak 7.762 orang (98,70%), MOW sebanyak 2.972 (151,32%), MOP sebanyak 394 (67,93%), Kondom sebanyak 10.146 (136,74%), Implan sebanyak 15.626 (96,04%), Suntik sebanyak 64.352 (130,01%), Pil sebanyak 34.231 (37,81%), Peserta KB aktif (PA) sebanyak 551.107, jumlah PPM PA sebanayak 503.646, Total PUS sebanyak 804.891.

Pencapaian CPR menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tabel 1.2 Kepeserta ber-KB /Oktober 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nNo** | **Kabupaten/Kota** | **PUS** | **PA** | **CPR** |
| **Kabupaten** |
| 1 | Kepulauan Mentawai | 27.317 | 10.742 | 39,32% |
| 2 | Pesisir Selatan | 76.612 | 57.686 | 75,30% |
| 3 | Solok | 62.295 | 46.314 | 74,35% |
| 4 | Sijunjung | 41.380 | 30.012 | 72,53% |
| 5 | Tanah Datar | 47.215 | 34.881 | 73,88% |
| 6 | Padang Pariaman | 63.271 | 41.876 | 66,19% |
| 7 | Agam | 62.564 | 38.557 | 61,63% |
| 8 | Lima Puluh Kota | 58.165 | 42.878 | 73,72% |
| 9 | Pasaman | 48.007 | 30.286 | 63,09% |
| 10 | Solok Selatan | 25.284 | 18.248 | 72,17% |
| 11 | Dharmasraya | 42.640 | 35.113 | 82,35% |
| 12 | Pasaman Barat | 62.096 | 42.586 | 68,58% |
| **Kota** |
| 13 | Padang | 112.588 | 69.269 | 61,52% |
| 14 | Kota Solok | 10.698 | 7.808 | 72,99% |
| 15 | Sawahlunto | 10.182 | 8.098 | 79,53% |
| 16 | Padang Panjang |  7.083 | 5.183 | 73,18% |
| 17 | Bukittinggi | 16.412 | 10.325 | 62,91% |
| 18 | Payakumbuh | 19.727 | 13.910 | 70,51% |
| 19 | Kota Pariaman | 11.355 | 7.335 | 64,60% |
| 20 | Sumatera Barat | 804.891 | 551.107 | 68,47% |
|  |  |  |  |  |

Dari tabel diatas diketahui bahwa CPR pada kategori kabupaten paling tinggi Dharmasraya sebanyak 35.113 pus (82,35%) paling rendah Mentawai sebanyak 10.742 (39,32%). Kategori kota paling tinggi Sawah Lunto sebanyak 8.098 pus (79,53%) paling rendah Padang sebanyak 69.269 (61,52%).

Pada kurun waktu dua tahun terakhir 2015-2017 dapat dilihat pencapaian CPR Provinsi Sumatera Barat cenderung naik sebanyak 134.866 (11,28%) yaitu tahun 2015 CPR 57,19% cenderung naik per Oktober tahun 2017 68,47%. Dari kondisi kepesertaan ber-KB dan kondisi unmeet need Provinsi Sumatera Barat masih tinggi

Tabel 1.2 Tabel Indikator laju pertumbuhan penduduk (LPP), Total fertility rate (TFR), dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2018-2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **TFR** | **LPP** | **Jumlah penduduk** | **Pertumbuhan Ekonomi** |
| 2017 | 2,61 | 1,18 | 5.321.758 | 6,16 |
| 2018 | 2,55 | 1,14 | 5.382.426 | 6,26 |
| 2019 | 2,44 | 1,10 | 5.441.632 | 6,35 |
| 2020 | 2,39 | 1,06 | 5.499.313 | 6,44 |
| 2021 | 2,33 | 1,02 | 5.555.405 | 6,54 |

Dari tabel diatas diketahui LPP pertahun 4% pertumbuhan ekonomi 6%/tahun.

Pencapaian kepesertaan KB pada periode tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Kepesertaan ber-KB tahun 2017 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten/Kota** | **PUS** | **PA** | **CPR** |
| **Kabupaten** |
| 1 | Kepulauan Mentawai | 27.317 | 10.742 | 39,32% |
| 2 | Pesisir Selatan | 76.098 | 57.761 | 75,90% |
| 3 | Solok | 62.429 | 46.375 | 74,28% |
| 4 | Sijunjung | 41.956 | 29.607 | 70,57% |
| 5 | Tanah Datar | 49.619 | 38.742 | 78,08% |
| 6 | Padang Pariaman | 63.745 | 42.714 | 67,01% |
| 7 | Agam | 61.678 | 37.521 | 60,83% |
| 8 | Lima Puluh Kota | 68.257 | 52.887 | 77,48% |
| 9 | Pasaman | 48.758 | 31.442 | 64,49% |
| 10 | Solok Selatan | 24.837 | 18.296 | 73,66% |
| 11 | Dharmasraya | 41.997 | 33.246 | 79,16% |
| 12 | Pasaman Barat | 64.741 | 40.373 | 62,36% |
| **Kota** |
| 13 | Padang | 113.586 | 70.408 | 61,99% |
| 14 | Kota Solok | 11.170 | 7.877 | 70,52% |
| 15 | Sawahlunto | 9.869 | 7.777 | 78,80% |
| 16 | Padang Panjang | 7.191 | 5.195 | 72,24% |
| 17 | Bukittinggi | 16.455 | 10.496 | 63,79% |
| 18 | Payakumbuh | 19.740 | 14.043 | 71,14% |
| 19 | Kota Pariaman | 11.449 | 7.374 | 64,41% |
| 20 | Sumatera Barat | 820.892 | 562.876 | 68,57% |

 Sumber : Dallap 2017

Kondisi kepesertaan ber-KB pada kategori kabupaten paling tinggi Pesisir Selatan sebanyak 57.761 pus (75,90%) paling rendah kepulauanMnetawai sebanyak 10.742 (39,32%). Kategori kota paling tinggi Padang sebanyak 70.408 pus (61,99%) paling rendah Padang Panjang sebanyak 5.195 (72,24%).

Kondisi unmeet need kabupaten/kota tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 unmeet need kabupaten/kota tahun 2017:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Unmeet need  |
| **Kabupaten** |
|  |  | Pus | % |
| 1 | Kepulauan mentawai | 7.861 | 28,78% |
| 2 | Pesisr Selatan | 6.763 | 8.89 |
| 3 | Solok | 5.928 | 9,50 |
| 4 | Sijunjung | 5.666 | 13,50 |
| 5 | Tanah Datar | 5.977 | 12,05 |
| 6 | Padang Pariaman | 8.078 | 12,67 |
| 7 | Agam | 11.925 | 19,33 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 8.245 | 12,08 |
| 9 | Pasaman | 7.247 | 14,86 |
| 10 | Solok Selatan | 2.784 | 11,21 |
| 11 | Dharmasraya | 4.786 | 11,40 |
| 12 | Pasaman Barat | 13.644 | 21,07 |
| **Kota** |
| 13 | Padang | 22.996 | 20,25 |
| 14 | Solok | 5.928 | 9,50 |
| 15 | Sawahlunto | 884 | 8,96 |
| 16 | Padang Panjang | 840 | 11,68 |
| 17 | Bukittinggi | 3.232 | 19,64 |
| 18 | Payakumbuh | 2.821 | 14,29 |
| 19 | Pariaman | 1.953 | 17,06 |
| 20 | Provinsi | 122.912 | 14,97 |

Sumber :Dallap 2017

Dari tabel diatas unmeet need kategori kabupaten paling tinggi pada Pasaman Barat sebanyak 13.644 pus (21,07%) paling rendah Solok Selatan sebanyak 2.784 pus (11,21%). Kategori kota paling tinggi pada Padang sebanyak 22.996 pus (20,25%) paling rendah Padang Panjang sebanyak 840 pus (11,68%). secara keseluruhan unneedmeet provinsi Sumatera Barat sebanyak 122.912 PUS (14,97%).

Kondisi fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB di provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 Tabel Cakupan Laporan Pelayan Kontrasepsi Bulan Desember 2016:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Ada** | **Lapor** | **%** |
| 1 | Faskes KB Pemerintah | 405 | 385 | 95,06 |
| 2 | Faskes KB Swasta | 23 | 19 | 82,61 |
| 3 | Praktek Dokter | 456 | 334 | 73,25 |
| 4 | Praktek Bidan Mandiri | 2.194 | 1.915 | 87,28 |
| 5 | Jejaringan Faskes KB Lainnya | 304 | 231 | 75,99 |

Faskes KB pemerintah sebanyak 405 yang lapor 385 (95,06%), faskes KB swasta sebanyak 23 yang melapor sebanyak 19 (82,61%), praktek dokter sebanyak 456 yang melapor 334 (73,25%), praktek bidan mandiri sebanyak 2.194 yang lapor sebanyak 1.915 (87,28%), jejaringan faskes KB lainya sebanyak 304 yang melapor sebanyak 231 (75,99%).

Dari kondisi kepesertaan ber-KB dan kondisi unmeet need serta kondisi faskes untuk pelayanan KB di kabupaten/kota perlu dilaksanakan advokasi pembinaan dan pelayanan KB se Provinsi Sumatera Barat.